

11. URUSAN KOPERASI DAN UKM

Urusan Koperasi dan UKM dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Bagian Perekonomian Setda, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Kertek, Kecamatan Leksono, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Garung, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kepil; Kecamatan Sukoharjo.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 telah mengalokasikan dana sebesar Rp5.203.500.000,00 atau 0,26% dari total alokasi APBD tahun 2018 yang berjumlah Rp2.027.393.505.735,00. Alokasi sebesar Rp5.203.500.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp4.876.562.414,00 atau 93,72%. Adapun program dan alokasi anggaran urusan Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.C.11. 1
Alokasi Program Anggaran Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2018

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi Anggaran	
			(Rupiah)	%
A	Belanja Langsung	5.203.500.000	4.876.562.414	93,72
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	2.983.500.000	2.751.467.350	92,22
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	850.000.000	785.681.714	82,70
3	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	370.000.000	366.351.100	99,01
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.000.000.000	973.062.250	97,31
B	Belanja Tidak langsung	-	-	
1	Belanja Pegawai	-	-	
	Jumlah total	5.203.500.000	4.876.562.414	93,72

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo 2019 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.

Melalui program ini diharapkan UMKM dapat meningkatkan pengetahuan/ ketrampilan usaha, mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UMKM sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan produk-produk UMKM yang lebih inovatif.

Kegiatan yang telah dilaksanakan melalui program ini antara lain berupa pelatihan peningkatan kualitas SDM dalam rangka pengelolaan usaha, pelatihan peningkatan kualitas produk, dan peningkatan akses pasar. Sasaran program/kegiatan ini tidak hanya masyarakat yang sudah mempunyai usaha/UMKM tapi juga masyarakat umum maupun masyarakat pra sejahtera yang belum mempunyai usaha dan diharapkan bisa mempunyai ketrampilan kewirausahaan serta bisa menjadi wirausaha baru

sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga yang pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.

Program ini berperan besar dalam meningkatkan indikator jumlah UMKM dengan munculnya wirausaha baru yang secara otomatis juga akan meningkatkan omset maupun aset UMKM.

2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Dengan adanya program ini akan mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM.

Kegiatan yang telah dilaksanakan melalui program ini antara lain pengembangan jejaring bisnis UMKM serta pembinaan LKM dengan tujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi UMKM, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

3) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi peningkatan kinerja UMKM, sehingga dapat mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha, meningkatkan skala usaha, mutu layanan perijinan/pendirian usaha dan partisipasi *stakeholders* dalam pengembangan kebijakan UMKM. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi IUMK (Ijin Usaha Mikro Kecil) yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.

4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya. Di samping itu kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder akan lebih terkoordinir serta pencapaian dari segi fungsionalitas akan lebih baik lagi. Dan juga sarana dan infrastruktur pendukung pengembangan koperasi diharapkan akan semakin lengkap dan berkualitas, efektifitas lembaga koperasi semakin berfungsi baik.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain pembinaan, pengawasan dan pengelolaan koperasi yang bertujuan meningkatkan koperasi sehat dan meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi serta menciptakan SDM yang kreatif, inovatif baik sebagai pengurus maupun pengelola koperasi serta mampu memberdayakan potensi yang ada sehingga koperasi menjadi lembaga ekonomi yang tangguh dan mandiri.

c. Capaian Kinerja

Tabel IV.C.11. 2

Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
				Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	
1	Persentase Usaha Mikro dan kecil terhadap UKM	%	97,50%	98,80	99,81	101,02	0	98,82
2	Persentase kenaikan tenaga kerja Koperasi	%	5,00%	6,00	6,50	108,33	0	10,00
3	Persentase kenaikan tenaga kerja UMKM	%	0,18%	0,30	0,31	103,33	0	0,50
4	Persentase Penambahan jumlah wirausaha baru	%	3,00%	5,00	6,86	137,20	0	10,00
5	Persentase koperasi terhadap jumlah UMKM	%	2,00%	2,50	0,64	25,60	Δ Δ Δ Δ	5,00
6	Persentase kenaikan Jumlah UMKM	%	6,50%	9,00	2,00	22,22	Δ Δ Δ Δ	15,00
7	Persentase kenaikan Aset UMKM	%	5,50%	9,00	2,00	22,22	Δ Δ Δ Δ	15,00
8	Persentase kenaikan Omset UMKM (juta)	%	5,40%	9,00	2,00	22,22	Δ Δ Δ Δ	15,00
9	Persentase Koperasi yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan	%	73,00%	82,00	73,00	89,02	◇	95,00
10	Persentase UMKM yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan	%	8,00%	14,00	8,00	57,14	● ● ●	20,00
11	Persentase UMKM memiliki perijinan	%	66,00%	75,00	66,00	88,00	● ● ●	100,00
12	Persentase kenaikan Aset Koperasi	%	3,10%	4,40	3,10	70,45	● ● ●	6,50
13	Persentase kenaikan Omset Koperasi	%	3,20	4,40	3,20	72,73	● ● ●	6,50
14	Persentase koperasi sehat terhadap koperasi aktif	%	59,00	70,00	100,00	142,86	0	100,00
15	Persentase jumlah koperasi aktif	%	67,00	69,00	65,22	94,52	◇	75,00

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
				Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	
	terhadap jumlah koperasi							

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo, 2019

Keterangan Status Capaian:

0	Telah Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
◇	Akan tercapai	Realisasi capaian $>80\%$ - $99,99\%$
● ● ●	Perlu Perhatian	Realisasi capaian $>40\%$ dan $<80\%$
△ △ △ △	Perlu Kerja Keras	Realisasi capaian $\leq 40\%$

Capaian kinerja urusan Koperasi dan UKM bisa dilihat dari indikator RKPD 2018. Di mana dari 15 indikator, 5 indikator telah tercapai, 2 indikator akan tercapai, 4 indikator perlu perhatian dan 4 indikator perlu kerja keras. Indikator yang perlu kerja keras adalah persentase koperasi terhadap jumlah UMKM yaitu sebesar 0,64% di mana dari 60.592 UMKM ada 391 koperasi, tetapi koperasi tersebut tidak semuanya mewadahi UMKM seperti koperasi karyawan atau KPRI. Perlu adanya fasilitasi dari OPD terkait untuk memberikan pengetahuan dan memotivasi UMKM sejenis untuk mendirikan koperasi sehingga akan meningkatkan skala ekonomi usaha. Indikator lainnya adalah kenaikan jumlah UMKM yang masih di angka 2%. Angka ini belum mencapai target yang disebabkan belum membudayanya jiwa wirausaha di masyarakat. Untuk itu diperukan kegiatan sosialisasi kewirausahaan dan program-program yang berorientasi kewirausahaan untuk menumbuhkan wirausaha baru. Lambatnya kenaikan jumlah UMKM akan mempengaruhi jumlah omset maupun aset UMKM. Sehingga untuk meningkatkan omset maupun aset UMKM perlu memfasilitasi pembentukan wirausaha baru (yang otomatis akan meningkatkan jumlah UMKM) baik melalui sistem magang maupun pelatihan berkelanjutan.

Sedangkan indikator yang perlu kerja keras adalah persentase UMKM yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan dengan kondisi masih 8%. Di mana dari 60.592 UMKM, yang mampu mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan baru 4.847 UMKM. Sedangkan sisanya sebanyak 55.745 UMKM belum mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, di mana sebagian dari UMKM tersebut dianggap belum *bankeable* atau tidak memenuhi persyaratan bank, salah satunya berupa pelaporan keuangan UMKM sehingga belum memenuhi kriteria persyaratan pinjaman meskipun dari sisi usaha sudah layak atau *feasible*. Program yang perlu dilakukan antara lain berupa pelatihan pengelolaan usaha, peningkatan kualitas produk, pelatihan teknik produksi yang baik, pengetahuan pasar produk dan legalitas usaha.

Sementara indikator persentase UMKM yang memiliki perijinan baru 66% atau 39.990 UMKM. Sehingga perlu adanya fasilitasi pemerintah untuk mendorong dan memotivasi UMKM untuk mengajukan ijin usaha mikro kecil (UMK) agar UMKM semakin maju dan bisa bersaing di

pasar global. Untuk indikator kenaikan aset maupun omset koperasi juga masih sangat rendah yaitu sekitar 3%. Untuk meningkatkannya salah satunya adalah kemitraan dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) serta memberikan pelayanan yang cepat dan mudah.

Capaian kinerja urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo ditunjukkan oleh indikator prosentase jumlah koperasi aktif terhadap jumlah seluruh koperasi dan prosentase jumlah usaha mikro dan kecil terhadap jumlah seluruh UMKM.

Prosentase koperasi aktif di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 sebesar 65,22% nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 63,34%.

Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan jumlah koperasi sebesar 20 koperasi, yang tadinya tidak aktif setelah diadakan pembinaan dan monitoring secara rutin koperasi tersebut mulai aktif dengan terselenggaranya Rapat Anggota Tahunan (RAT). Untuk itu di tahun-tahun mendatang perlu adanya dukungan anggaran untuk pembinaan dan pengawasan koperasi sehingga akan meningkatkan jumlah koperasi aktif.

Demikian pula prosentase jumlah usaha mikro dan kecil di tahun 2018 sebesar 99,82% meningkat dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 99,81%. Kondisi ini dipengaruhi meningkatnya jumlah UMKM di mana tahun 2018 sebesar 60.480 unit meningkat dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 59.293 unit. Di samping itu juga dipengaruhi oleh munculnya wirausaha baru skala mikro kecil yang tumbuh cukup banyak di tahun 2018 yaitu sebesar 1.187 unit. Tumbuhnya wirausaha baru tersebut didukung adanya pelatihan pemanfaatan internet untuk penjualan/pemasaran produk secara online sehingga ada kontinuitas usaha. Untuk mempertahankan kondisi tersebut perlu adanya penguatan kapasitas SDM, kreativitas serta pelatihan usaha.

d. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan Koperasi dan UMKM, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

Tabel IV.C.11. 3

Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Koperasi dan UMKM

No	Permasalahan	Solusi
1	Masih rendahnya kesadaran berkoperasi di kalangan anggota.	- o Meningkatkan partisipasi anggota melalui pengelolaan koperasi secara efektif dan efisien. - o Memberi kesempatan anggota dalam proses pengambilan keputusan, kegiatan usaha dan pengawasan. - o Menyadarkan anggota untuk memanfaatkan layanan koperasi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
2	Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam mengakses pasar.	Peningkatan kapasitas, produktivitas dan diversifikasi produk koperasi dan UMKM dalam rangka pengembangan produk yang berkualitas, inovatif, kreatif dan berdaya saing.
3	Masih kurangnya kemampuan koperasi dan UMKM dalam penguasaan teknologi informasi.	Peningkatan nilai tambah produk dan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi yang inovatif agar mampu bersaing baik di pasar domestik maupun

No	Permasalahan	Solusi
		mancanegara.
4	Promosi dan pemasaran yang belum optimal serta terbatasnya informasi pasar mengenai produk unggulan daerah.	Peningkatan promosi produk koperasi dan UMKM di pasar domestik maupun internasional, melalui promosi produk unggulan dengan menyediakan informasi pasar berbasis IT dan menyediakan SDM untuk menjalankan fungsi pemasaran.
5	Belum optimalnya kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha lainnya.	Peningkatan pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk-produk unggulan yang berbasis rantai nilai, sub kontrak, alih teknologi, pemasaran/ekspor maupun investasi.
6	Rendahnya profesionalisme pengelola koperasi dan UMKM.	Meningkatkan profesionalisme pengelola koperasi dan UMKM dengan peningkatan SDM melalui pelatihan dan uji kompetensi manager, juru buku, pengawas serta pelatihan manajemen usaha dan standarisasi produk UMKM.